

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Penegasan Istilah	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II TEORI KONTRADIKSI HUKUM.....	36
A. Kontradiksi.....	36
1. Teori Kontradiksi.....	36
2. Konsep Dasar Teori Kontradiksi	39
3. Tinjauan Sejarah Teori Kontradiksi	41
4. Jenis-jenis Kontradiksi Hukum	44
B. Kontradiksi Dalam Hukum	50

1. Memahami Kontradiksi Dalam Hukum	50
2. Asas Peraturan Perundang-undangan	54
3. Kontradiksi dalam Hukum Internasional dan Hukum Domestik	57
4. Implikasi Kontradiksi Dalam Hukum	58
5. Menyelesaikan Kontradiksi Ketentuan Hukum	62
6. Mencegah Kontradiksi Hukum di Masa Depan	65
7. Pertimbangan Filosofis dalam Pertentangan Hukum	67
8. Studi Kasus Kontradiksi Dalam Hukum	70
9. Dampak Kontradiksi terhadap Keadilan	72
10. Perspektif Historis Tentang Kontradiksi	74
C. Harmonisasi Hukum	77
1. Harmonisasi Hukum	77
2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum	79
3. Fungsi Harmonisasi Hukum	81
4. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang	83
BAB III KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN	
HUKUM ISLAM	87
A. Perkawinan Dalam Hukum Positif	87
1. Pemahaman Tentang Perkawinan Dalam Hukum Positif	87
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	90
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	93
4. Peran Perkawinan Dalam Masyarakat: Perspektif Hukum Positif ..	94
B. Perkawinan Dalam Islam	95
1. Pemahaman Tentang Perkawinan Dalam Hukum	95
2. Dampak Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan	100
3. Perkawinan Sirri	101
C. Perbandingan Perkawinan Belum Tercatat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	113
1. Pengertian Perkawinan Belum Tercatat	117
2. Perkawinan Belum Tercatat Menurut Undang-undang Perkawinan	118
D. Regulasi Hukum di Indonesia	120
1. Memahami Peraturan Hukum di Indonesia	120
2. Kerangka Hukum di Indonesia	123

3. Badan Regulator di Indonesia	125
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 (Hierarki)	127
BAB IV PENCATATAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA	129
A. Surat Edaran Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	129
B. Dasar Hukum Pelaksanaan SE Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	131
C. Landasan Hukum Blangko Kartu Keluarga	135
D. Prosedur Penerbitan Kartu Keluarga di DISPENDUKAPIL Jombang	139
E. Pencatatan Perkawinan Sirri di Kabupaten Jombang	143
F. Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	145
BAB V STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG	150
A. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang	150
B. Prosedur Untuk Mencantumkan Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga (KK)	158
C. Status Perkawinan	162
D. Keterkaitan Status Kawin dan Kartu Keluarga	165
E. Implikasi dan Dampak Status Kawin Belum Tercatat	171
F. Pentingnya Pencatatan Status Kawin Dalam Kartu Keluarga	176
BAB VI STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG	188
A. Kantor Urusan Agama di Jombang	188
B. Status Kawin Menurut Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang	199
C. Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah Di KUA Jombang	208
D. Ketidaksesuaian Status Kawin Dalam Kartu Keluarga	218

E. Dampak Status Kawin Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	223
BAB VII KONTRADIKSI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019	
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN	
1974 PERSPEKTIF DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KANTOR	
URUSAN AGAMA.....	229
A. Analisis PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sirri.....	229
B. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jombang	231
C. Kontradiksi PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	233
D. Dampak Kontradiksi Hukum Pada Perkawinan Sirri	237
E. Upaya Penyelesaian Kontradiksi Hukum Perkawinan di Indonesia..	240
BAB VIII HARMONISASI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN	
SIRRI DALAM KARTU KELUARGA	246
A. Pendekatan Harmonisasi Hukum	246
B. Langkah-langkah Harmonisasi Hukum	252
C. Harmonisasi Regulasi Pencatatan Perkawinan	253
BAB IX PENUTUP	259
A. Kesimpulan.....	259
B. Saran	263
DAFTAR PUSTAKA	265